

Judul : Tanpa perawatan sama sekali: Puluhan mobil dinas rusak bikin sempit belakang DPR
Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tanpa Perawatan Sama Sekali

Puluhan Mobil Dinas Rusak Bikin Sempit Belakang DPR

Puluhan mobil dinas (mobdin) teronggok di belakang Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

MOBIL Daihatsu Xenia ini, kondisinya memprihatinkan. Mobil buatan Jepang itu dibiarkan menganggur bertahun-tahun tanpa perawatan sama sekali.

Mobil warna biru itu diparkir rapi di sekitar warung makan, tidak jauh dari Masjid Baiturrahman DPR. Saking banyaknya kendaraan yang terparkir, mengakibatkan jalan menyempit. Jalan yang semula selebar 6 meter, hanya tinggal 1,5 meter. Akibatnya, hanya cukup untuk kendaraan roda dua berpapasan.

"Mobil-mobil itu sudah diparkir sejak awal tahun 2016," ujar Hartono, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kesekjenan DPR kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Sebagian besar kendaraan sudah rusak parah. Kaca spion terlipat dan copot, lampu depan pecah, kap berdebu tebal dan dipenuhi dedaunan, hingga ban kempes. Jok mobil pun sebagian ada yang sobek dimakan usia.

Selain Xenia, juga ada beberapa bus berukuran kecil yang diparkir bercampur menjadi satu. Jarak antara mobil satu dan yang lain cukup sempit, sehingga cukup menyulitkan bila ingin memindahkan mobil tersebut ke lokasi lain. "Totalnya, ada 33 Daihatsu Xenia dan 5 microbus yang terparkir di sini," sebut Hartono kembali.

Tidak jauh dari mobdin itu juga teronggok dua sedan Peugeot dengan kondisi lebih memprihatinkan. Mobil bercat hitam itu kusam karena terpapar langsung guyuran air hujan dan sengatan

matahari. Keempat rodanya juga kempis. Mirisnya lagi, mobil buatan Prancis itu tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah. "Mobil itu bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenu) tahun 2010. Bellnya secara built up, langsung dari Prancis," ungkap dia.

Menurut Hartono, seluruh mobdin yang teronggok merupakan bekas pejabat eselon tiga di Kesekjenan DPR. Sebab, mereka telah mendapat mobdin pengganti berjenis Toyota Innova. "Jadi, mobdin lama harus dikembalikan ke Sekretariat DPR," kata dia.

Pria yang mengenakan kemeja warna gelap ini menyebut, awalnya mobdin yang teronggok di belakang Komplek DPR berjumlah 41 unit, berjenis Daihatsu Xenia dan 6 unit microbus. Namun, saat dilakukan lelang bulan Juni 2016, 8 mobil Daihatsu telah laku terjual dengan harga limit Rp 48 juta, sementara microbus hanya terjual satu seharga Rp 24 juta.

"Mobil lainnya tidak laku karena terlalu mahal dan kondisinya banyak yang rusak," sebut dia.

Menurut Hartono, saat lelang pesertanya tidak terlalu banyak, hanya dua orang peminat per unit kendaraan yang ditawarkan. Bahkan, sebagian besar kendaraan itu tidak ada peminatnya sama sekali.

"Tapi lumayan, lelang tersebut menghasilkan uang ratusan juta ke kas negara," ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Hartono, mobil yang laku saat lelang sebelumnya sebanyak 9 unit Daihatsu Xenia, namun peserta



TAK TERAWAT: Puluhan mobil dinas milik pejabat eselon III DPR teronggok tak terawat.

lelang digugurkan karena telat menyertakan uang deposit ke panitia sebesar Rp 20 juta.

"Jadi, peserta mengirimkan uang secara menciil. Nah saat melunasi cicilan kedua sebesar Rp 10 juta, ternyata sudah telat," sebutnya.

Walhasil, kata dia, mobil yang telah menjadi incaran tersebut dibatalkan oleh panitia. "Kami tegas kalau soal deposit. Kalau telat, ya gagal," tandasnya.

Karena tidak laku, menurut Hartono, seluruh mobil buatan tahun 2005 ini akan kembali dilelang pada pertengahan Januari 2018. Saat ini, masih proses appraisal (perkiraan) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian

Keuangan (Kemenuk).

"Tapi harganya turun separuhnya. Mobil Daihatsu limitnya dibuka menjadi Rp 24 juta. Sementara mobil Peugeot dijual hanya Rp 5 juta dengan kondisi tidak ada surat-suratnya," urai Hartono.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang, kata dia, harus menyerahkan uang deposit sebesar Rp 10 juta ke KPKNL. "Tapi saat ini, penyetoran deposit belum dibuka karena tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL belum menetapkan tanggal lelang," ujar Hartono.

Deposit yang diserahkan peserta lelang, kata Hartono, tidak akan hangus bila peserta tidak

mendapat mobil yang menjadi incarannya. "Biasanya beberapa hari setelah lelang, uang deposit akan dikembalikan," ucapnya.

Biasanya, kata Hartono, dua minggu sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat bisa menyertakan deposit sambil melihat-lihat mobil yang akan dilelang. Saat ini, kata dia, sudah banyak orang yang tanya-tanya terkait pelaksanaan lelang, baik melalui telepon maupun datang langsung ke DPR.

"Kami ingin secepatnya dilelang agar mobil tidak semakin rusak, sehingga harganya terus turun," tandasnya.

Dia berharap, mobdin yang sudah lama teronggok di halaman belakang DPR, bisa secepatnya terjual karena kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, sejak kendaraan tersebut mulai dilelang bulan Juni 2016, anggaran perawatan sudah tidak ada lagi. "Tapi kondisi mesinnya masih bagus," klaim Hartono.

Kendati demikian, lanjutnya, bila ingin menyalakan mobil tersebut, akunya harus terlebih dahulu dijamper karena sudah lama tidak dipanaskan mesinnya. "Dulu sering dipanaskan. Tapi sekarang, karena sudah tidak ada bensin, ya dibiarkan saja," pasrahnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) DPR Damayanti menambahkan, kendaraan yang terlantar di belakang komplek DPR masih dalam proses appraisal (perkiraan) dari Kementerian Keuangan, sehingga belum bisa dilakukan pelelangan. "Bila sudah diketahui harganya, baru bisa kita lelang. Kita tidak boleh menentukan harga sendiri," ucapnya. ■ TIF